

ANALISIS KEMISKINAN DIGITAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN DI MASA PANDEMI COVID-19

ANALYSIS OF DIGITAL POVERTY AMONG DISTRICTS IN BANTEN PROVINCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Siska Putri^{1*} dan Tiodora Hadumaon Siagian²

¹)BPS Kota Tangerang Selatan; Jl Raya Serpong-Puspitek No 156, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15314.

²)Politeknik Statistika STIS; Jl. Otto Iskandardinata No 64C, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia 13330.

*Email: siska_futri@bps.go.id

disubmit: 13 Oktober 2022, direvisi: 11 November 2022, diterima: 29 November 2022

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun 2020 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi akibat berubahnya berbagai kegiatan manusia dari offline ke online. Namun ternyata masih terdapat penduduk yang hidup dengan sedikit atau bahkan tanpa akses ke teknologi (miskin digital). Penelitian ini bertujuan menghitung kemiskinan digital menurut Barrantes, sebaran dan keterkaitannya dengan kemiskinan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Banten pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS pada bulan Maret tahun 2020 dan 2021. Data dianalisis menggunakan Indeks kemiskinan digital dan Indeks kemiskinan ekonomi, serta analisis quadran. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2021 angka kemiskinan digital kabupaten/kota di Provinsi Banten secara umum menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dua dari delapan kabupaten/ kota di Banten memiliki angka kemiskinan digital dan juga angka kemiskinan ekonomi yang tinggi, yaitu Kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak. Untuk itu, pemerintah daerah provinsi Banten hendaknya dapat memprioritaskan perbaikan pada dua aspek tersebut di dua kabupaten ini.

Kata kunci: *Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemiskinan digital, kemiskinan ekonomi,*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that hit the world throughout 2020 has changed various aspects of life, especially in the use of Information and Communication Technology facilities due to changes in various human activities from offline to online. However, it turns out that there are still people who live with little or no access to technology (digitally poor). This study aims to calculate digital poverty according to Barrantes, its distribution and linkages to economic poverty in regencies/cities in Banten Province during the Covid-19 pandemic. The research method used is descriptive with data sourced from the BPS National Socioeconomic Survey in March 2020 and 2021. Data were analyzed using the digital poverty index and economic poverty index, as well as the GIS Quadrant. The results of the study show that in 2021 the digital poverty rate for districts/cities in Banten Province will generally decrease compared to the previous year. Two of the eight districts/cities in Banten have high digital poverty rates as well as high economic poverty rates, namely Pandeglang Regency and Lebak Regency. For this reason, the regional government of Banten province should be able to prioritize improvements to these two aspects in these two districts.

Keywords: *Information and Communication Technology, digital poverty, economic poverty*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun 2020 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Adanya pedoman dan peraturan pembatasan jarak sosial yang diberlakukan dalam menghadapi Covid-19, masyarakat semakin mengandalkan akses ke internet untuk informasi, pekerjaan, sekolah, dan interaksi sosial (Lai & Widmar, 2021). Banyak kantor dan perusahaan tutup, aktivitas bekerja berpindah ke rumah. Rapat, pelatihan, webinar dan semua aktivitas yang biasanya dilakukan dengan tatap muka, dilakukan secara online. Begitu juga dengan kegiatan di sekolah, aktivitas belajar mengajar berpindah ke rumah, beralih menjadi pembelajaran secara online.

Perubahan moda kegiatan masyarakat tersebut, disadari atau tidak, semakin mendekatkan masyarakat dengan teknologi. Aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan komunikasi video seperti *Zoom*, *Google Meet* dan *Cisco Webex* yang sebelumnya hanya dipakai oleh para pebisnis, menjadi kebutuhan masyarakat. Semua masyarakat tak terkecuali pekerja kantor dan pelajar menggunakan aplikasi meeting online

guna menunjang kegiatan belajar mengajar hingga rapat.

Sebagian masyarakat dapat menggunakan akses mereka ke teknologi digital yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat mengakses jarak jauh ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, begitu juga dengan fasilitas lainnya. Namun, sebagian masyarakat lain tidak terhubung dengan teknologi digital tersebut karena mereka tidak memiliki akses internet dan/atau memiliki tingkat literasi digital yang rendah (Seah, 2020). Individu yang tidak dapat memanfaatkan TIK bisa disebabkan karena ketidakmampuannya memiliki perangkat TIK atau bisa juga disebabkan karena kurangnya kemampuan untuk menggunakan perangkat TIK.

Sejak pemerintah Indonesia mengembangkan infrastruktur internet pada tahun 1980-an, jumlah pengguna internet terus meningkat (Nasution, 2016). Persentase pengguna internet di Banten meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pengguna internet di Banten sebesar 58,63 persen sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 67,14 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Namun, meskipun secara umum persentase pengguna internet mengalami peningkatan, masih terdapat penduduk Banten yang hidup dengan sedikit atau bahkan tanpa akses ke teknologi atau yang disebut dengan miskin

secara digital (kemiskinan digital). Kemiskinan digital tidak hanya dialami oleh penduduk berpenghasilan rendah (miskin ekonomi) tetapi bisa juga dialami oleh penduduk yang berpenghasilan cukup (Barrantes, 2007).

Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara yang menyepakati suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu dari 17 tujuan yang disepakati adalah menghapus kemiskinan (mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk) yang salah satu poin targetnya adalah memastikan semua penduduk memperoleh akses teknologi.

Afzal et al., (2022) menemukan peningkatan penggunaan teknologi memiliki dampak yang berbeda antar negara tergantung pada tingkat pendapatannya, dimana internet diketahui bermanfaat untuk menurunkan kemiskinan sementara akses ke broadband internet dapat memberikan efek positif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Meskipun kemiskinan digital tidak selalu berdampak pada kemiskinan ekonomi, namun pemerataan informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di

berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat. Pemerataan informasi dan komunikasi saat ini paling efektif dilakukan dengan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat dan efisien (Budiarti & Khoirunnisa, 2019). Era digital telah menjadikan akses terhadap TIK bukan lagi sebagai kebutuhan tersier namun sudah menjadi sama pentingnya dengan akses terhadap air dan listrik (Gracie, 2022).

Beberapa peneliti telah meneliti tentang kemiskinan digital di Indonesia misalnya (Sakti, 2022), dalam penelitiannya mengukur kemiskinan digital pada level provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2019-2020. Peneliti lainnya adalah (Susanto, 2016), ia menganalisis kemiskinan digital di Indonesia pada tahun 2014-2016. Selain itu, peneliti (Permatasari, 2018) yang menganalisis kemiskinan digital kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Keunggulan dan kebaruan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah indeks kemiskinan digital sampai pada level kabupaten/ kota di Banten dengan data sampai tahun 2021. Penelitian ini menganalisis kemiskinan digital kabupaten/ kota di Banten. Dengan menggunakan ukuran kemiskinan Barrantes, penelitian ini menghasilkan

angka kemiskinan digital kabupaten/kota di Banten yang kemudian divisualisasikan dengan aplikasi *Quantum Geographic Information System* (QGIS). Selain itu, penelitian ini juga menyandingkan kemiskinan digital dengan kemiskinan ekonomi dalam analisis kuadran untuk mengelompokkan kabupaten/ kota berdasarkan tingkat kemiskinan digital dan kemiskinan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan kemiskinan digital kabupaten/kota di Provinsi Banten pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan ukuran kemiskinan digital Barrantes. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Data sekunder tersebut bersumber dari. mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret tahun 2020 dan 2021 pada 8 kabupaten/ kota di Banten. Susenas diselenggarakan oleh BPS setiap tahun dengan pengumpulan data secara semesteran yaitu di bulan Maret dan September. Sampel penelitian ini adalah individu yang berusia lima tahun ke atas (5+) di seluruh kabupaten/kota di Banten. Jumlah populasi pada tahun 2020 sebanyak 27.200 dan jumlah sampelnya sebanyak 24.948 sedangkan pada tahun 2021 jumlah populasinya adalah 27.418 dengan jumlah

sampel sebanyak 25.016. Kemiskinan digital dihitung menggunakan ukuran kemiskinan digital yang digunakan oleh Barrantes (2007), menyesuaikan kondisi rumah tangga data Susenas. Batasan kemiskinan digital dilihat dari penggunaan telepon seluler, kepemilikan/ penguasaan telepon seluler, penggunaan komputer, akses terhadap internet, dan pemanfaatan internet. Ada empat kategori kemiskinan digital, yaitu:

1. Kaya digital (*Digitally “Wealthy”*), yaitu individu yang menggunakan telepon seluler atau komputer dan terakses internet secara aktif untuk mendapat informasi/ berita, mengirim/ menerima *e-mail*, transaksi jual-beli, hiburan, fasilitas finansial (*e-banking*), media sosial, dan lain-lain.
2. Terhubung internet (*Connected*), yaitu individu yang sudah menggunakan telepon seluler atau komputer dan mengakses internet, tetapi penggunaannya masih pasif hanya menggantikan fungsi mencari informasi dan komunikasi secara umum, misalnya untuk mengirim/ menerima *e-mail*, mendapatkan informasi/ berita, dan media sosial.
3. Miskin digital (*Digitally Poor*), yaitu individu yang sudah menggunakan atau memiliki telepon seluler namun belum menggunakan akses internet .

4. Miskin digital ekstrem (*Extremely Digitally Poor*), yaitu individu yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi atau tidak menggunakan dan memiliki telepon seluler dan tidak terhubung akses internet .

Individu yang berada pada kondisi miskin digital (poin 3) dan miskin digital ekstrem (poin 4) yang diperhitungkan dalam pengukuran indeks kemiskinan digital. Indeks kemiskinan digital dihitung dengan ukuran kemiskinan Headcount Index (Po) (Sakti, 2022).

Dalam bentuk matematis Headcount Index dituliskan sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{N_p}{N} \quad (1)$$

Dimana:

P_0 : Headcount Index

N_p : Jumlah penduduk yang miskin digital (poin 3 dan 4)

N : Jumlah penduduk yang berusia 5 tahun ke atas

Untuk indeks kemiskinan ekonomi, penelitian ini mengelompokan penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan kabupaten/ kota menjadi kaya secara ekonomi sedangkan penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya

sama atau di bawah garis kemiskinan kabupaten/ kota menjadi miskin secara ekonomi. Garis kemiskinan yang dipakai disesuaikan dengan tahun indeks kemiskinan ekonomi yang sedang dihitung, garis kemiskinan 2020 untuk menghitung indeks kemiskinan ekonomi 2020 sedangkan garis kemiskinan 2021 untuk menghitung indeks kemiskinan ekonomi. Berikut ini rumus untuk menghitung indeks kemiskinan ekonomi yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2):

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha \quad (2)$$

Dimana:

$\alpha = 0$;

z = garis kemiskinan kabupaten/ kota tahun 2020/ 2021

y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Dari rumus tersebut, diperoleh indeks kemiskinan digital dan indeks kemiskinan ekonomi kabupaten/ kota di Banten.

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. Memetakan kondisi kemiskinan digital dengan *Quadran GIS (QGIS)*. Tahap ini dilakukan dengan menggabungkan data indeks kemiskinan digital hasil olahan dengan file .shp peta kabupaten/ kota di Banten. Warna pada wilayah kabupaten/ kota pada peta menggambarkan tinggi rendahnya kemiskinan digital di daerah tersebut.
2. Menganalisis indeks kemiskinan digital dan indeks kemiskinan ekonomi pada kabupaten/ kota di Banten dengan menggunakan analisis kuadran. Indeks kemiskinan digital sebagai sumbu X sedangkan indeks kemiskinan ekonomi sebagai sumbu Y dengan *mean* (nilai rata-rata) sebagai *cut off* poin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Kemiskinan Digital

Indeks kemiskinan digital merupakan rasio jumlah penduduk yang dalam ukuran kemiskinan digital Barrantes termasuk dalam kategori miskin digital dan

Tabel 1
 Indeks Kemiskinan Digital dan Ekonomi Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Indeks Kemiskinan Digital	Indeks Kemiskinan Ekonomi
Pandeglang	0,687	0,099
Lebak	0,683	0,092
Tangerang	0,470	0,062
Serang	0,581	0,049
Kota Tangerang	0,303	0,052
Kota Cilegon	0,388	0,037
Kota Serang	0,475	0,061
Kota Tangerang Selatan	0,271	0,023
Provinsi Banten	0,466	0,059

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 2
 Indeks Kemiskinan Digital dan Ekonomi Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Indeks Kemiskinan Digital	Indeks Kemiskinan Ekonomi
Pandeglang	0,611	0,107
Lebak	0,611	0,103
Tangerang	0,346	0,071
Serang	0,500	0,055
Kota Tangerang	0,237	0,059
Kota Cilegon	0,315	0,042
Kota Serang	0,379	0,068
Kota Tangerang Selatan	0,229	0,026
Provinsi Banten	0,382	0,067

Sumber: Data Olahan, 2022

miskin digital ekstrem dengan jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas. Dengan kata lain, indeks kemiskinan digital memotret proporsi penduduk yang tidak memiliki dan menguasai telepon seluler dan penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler tetapi tidak mengakses internet.

Indeks kemiskinan digital kabupaten/ kota di Provinsi Banten pada tahun 2021 secara umum mengalami penurunan. Penurunan ini mungkin disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan akses internet hingga ke pelosok daerah, sehingga terwujudnya pemerataan kemudahan akses terhadap informasi. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat menjadi semakin digital mungkin juga menjadi salah satu faktor pendukung penurunan ini. Kabupaten/Kota yang mengalami laju penurunan indeks kemiskinan digital tertinggi adalah kabupaten Tangerang, menurun dari 0,470 menjadi 0,346 (menurun -0,124 poin).

Kabupaten/kota yang indeks kemiskinan digitalnya tetap tinggi yaitu kabupaten Pandeglang, kabupaten Lebak, dan kabupaten Serang. Tingginya indeks kemiskinan digital di daerah tersebut bisa saja disebabkan karena sebagian besar wilayahnya adalah daerah perdesaan. Kabupaten Pandeglang 56,58 persen desa/

kelurahannya adalah daerah perdesaan, sedangkan kabupaten Lebak 65,29 persen desa/ kelurahannya merupakan daerah perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2010).

Daerah perdesaan dengan segala keterbatasannya, masih mengalami kendala dalam mengakses internet. Ketidakmerataan infrastruktur juga bisa menimbulkan kesenjangan digital (Hadiyat, 2014). Dengan kesenjangan digital yang terjadi antara wilayah perkotaan dan wilayah pinggiran maka semakin menambah jarak (GAP) kemajuan pembangunan antara wilayah kota dan wilayah pinggiran karena internet atau dunia digital merupakan pintu utama dalam rangka mempercepat laju pembangunan suatu daerah (Nasution, 2016). Pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang sudah maju, tetapi juga harus melayani mereka yang masih tertinggal (Dhahir, 2019).

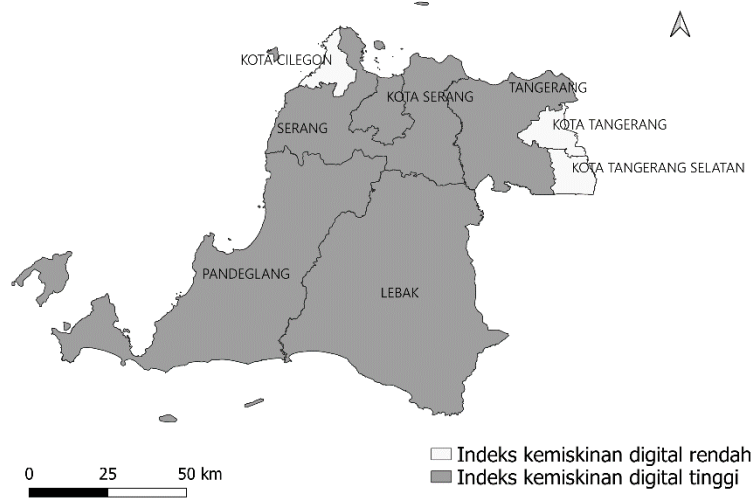
Kemiskinan digital bukan hanya faktor keuangan, faktor kekurangan pengetahuan berkaitan dengan TIK saja, tetapi konsepnya luas merangkumi semua aspek kehidupan seperti suasana lingkungan dan dukungan sosial (Ibrahim & Othman, 2022).

Sebaran Indeks Kemiskinan Digital Provinsi Banten Visualisasi dengan QGIS

Pada tahun 2020, tiga dari delapan kabupaten/kota di Banten memiliki indeks kemiskinan digital yang rendah karena memiliki angka kemiskinan digital yang

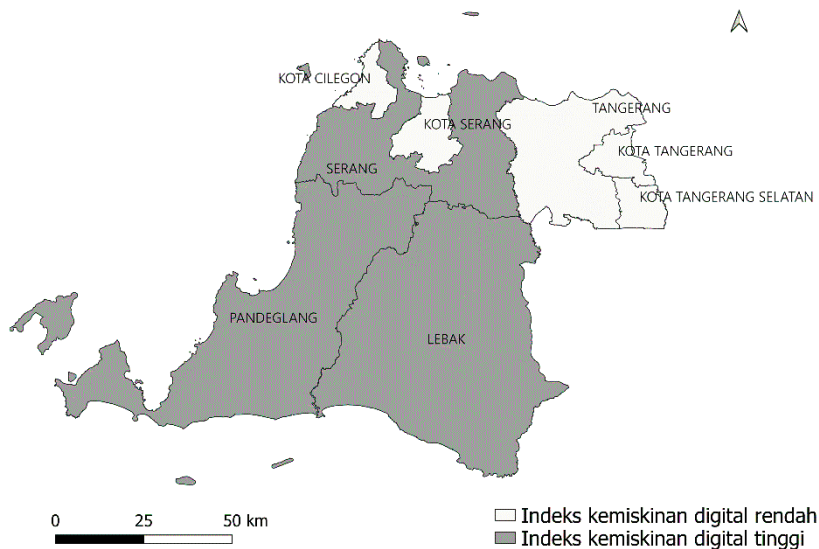
lebih rendah dari angka kemiskinan digital Provinsi Banten. Tiga kabupaten/kota tersebut yaitu kota Tangerang, kota Cilegon, dan kota Tangerang Selatan. Tiga kabupaten/ kota tersebut pada peta

INDEKS KEMISKINAN DIGITAL KABUPATEN/ KOTA DI BANTEN TAHUN 2020



Gambar 1. Peta Indeks Kemiskinan Digital Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 (Sumber: Data Olahan, 2022)

INDEKS KEMISKINAN DIGITAL KABUPATEN/ KOTA DI BANTEN TAHUN 2021



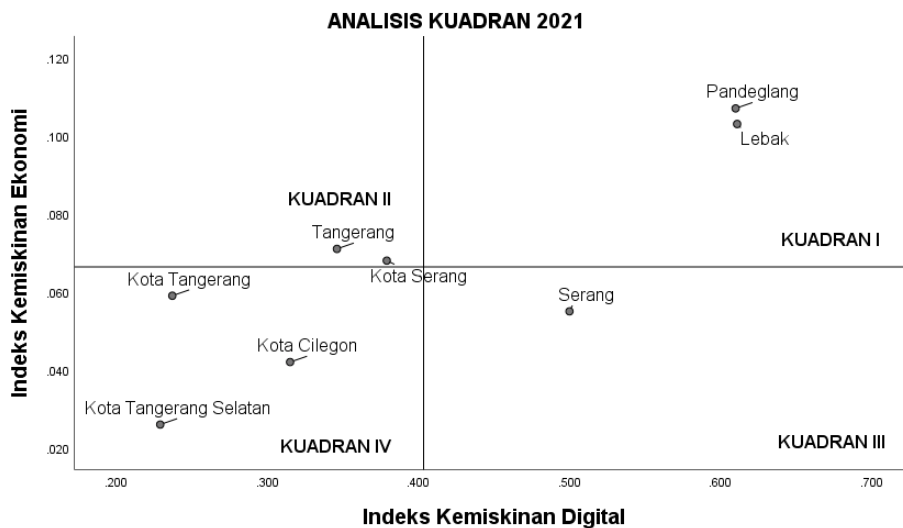
Gambar 2. Peta Indeks Kemiskinan Digital Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 (Sumber: Data Olahan, 2022)

divisualisasikan dengan wilayah yang berwarna putih (Gambar 1).

kemiskinan digitalnya tinggi tersebut yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupatek Lebak,



Gambar 3. Analisis Kuadaran Indeks Kemiskinan Digital dan Indeks Kemiskinan Ekonomi Tahun 2020 (Sumber: Data Olahan, 2022)



Gambar 4. Analisis Kuadaran Indeks Kemiskinan Digital dan Indeks Kemiskinan Ekonomi Tahun 2021 (Sumber: Data Olahan, 2022)

Kondisi berbalik di tahun 2021, jika di tahun 2020 hanya ada tiga daerah yang angka kemiskinan digitalnya rendah, di tahun 2021 hanya ada tiga daerah yang angka kemiskinan digitalnya tinggi (Gambar 2). Tiga daerah yang angka

dan Kabupaten Serang. Tiga kabupaten/kota tersebut pada peta divisualisasikan dengan wilayah yang berwarna abu-abu.

Keterkaitan antara Kemiskinan Digital dan Kemiskinan Ekonomi berdasarkan Analisis Kuadran

Ada hubungan yang kuat antara kemiskinan dan penetrasi informasi dan komunikasi teknologi (Flor, 2014). Kemiskinan digital tidak hanya dialami oleh individu yang berpenghasilan rendah (miskin secara ekonomi) tetapi juga bisa terjadi pada individu yang berpenghasilan cukup (tidak miskin secara ekonomi). Begitu juga pada kabupaten/ kota di Banten, kemiskinan digital yang tinggi tidak hanya terjadi pada kabupaten kota dengan tingkat kemiskinan ekonomi yang tinggi tetapi bisa juga terjadi pada kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekonomi yang rendah.

Analisis kuadran ini menunjukkan kelompok–kelompok kabupaten/ kota di Banten berdasarkan tingkat kemiskinan digitan dan kemiskinan ekonomi (Gambar 3 dan 4) sebagai berikut:

1. Kuadran I merupakan kelompok kabupaten/ kota dengan indeks kemiskinan digital relatif tinggi ditambah dengan indeks kemiskinan ekonomi yang juga tinggi. Kabupaten/ kota yang berada di kuadran I pada tahun 2020 adalah kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak. Posisi ini tidak berubah di tahun 2021.
2. Kuadran II merupakan kelompok kabupaten/kota dengan indeks kemiskinan digital yang relatif rendah namun indeks kemiskinan ekonominya masih tinggi. Kabupaten/ kota di Banten yang berada di kuadran II pada tahun 2020 adalah kabupaten Tangerang dan kota Serang. Posisi inipun tetap sama di tahun 2021.
3. Kuadran III merupakan kelompok kabupaten/ kota di Banten dengan indeks kemiskinan digital yang relatif tinggi namun indeks kemiskinan ekonominya sudah rendah. Kabupaten/ kota yang berada di kuadran III pada tahun 2020 adalah kabupaten Serang. Posisi ini tetap sama di tahun 2021.
4. Kuadran IV merupakan kelompok kabupaten/ kota dengan indeks kemiskinan digital sudah rendah dan indeks kemiskinan ekonomi yang juga rendah. Kabupaten/ kota di Banten yang berada di kuadran IV pada tahun 2020 adalah kota Tangerang, kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Posisi ini tetap sama di tahun 2021. Semua kabupaten/kota yang memiliki indeks kemiskinan yang rendah merupakan wilayah perkotaan. Hal ini terjadi mengingat masih adanya kesenjangan penetrasi internet, infrastruktur, kualitas SDM, dll antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Secara umum angka kemiskinan digital kabupaten/kota di Banten pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Tangerang mengalami laju penurunan indeks kemiskinan digital tertinggi di Banten, yaitu sebesar 26,4 dibandingkan tahun 2020. Di sisi lain penurunan indeks kemiskinan digital terendah terjadi di kabupaten Lebak yaitu sebesar 10,43 dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2020, lima dari delapan kabupaten/kota di Banten memiliki indeks kemiskinan digital yang tinggi, yaitu kabupaten Pandeglang, kabupaten Lebak, kabupaten Tangerang, kabupaten Serang, dan Kota Serang. Namun pada tahun 2021, hanya ada tiga dari delapan kabupaten/kota di Banten yang indeks kemiskinan digitalnya masih tinggi, yaitu kabupaten Pandeglang, kabupaten Lebak, dan kabupaten Serang.

Sementara itu, jika dikelompokkan dalam empat kuadran, maka di kuadran I (kemiskinan ekonomi tinggi – kemiskinan digital tinggi) adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kuadran II (kemiskinan digital rendah – kemiskinan ekonomi tinggi), Kabupaten Tangerang dan Kota Serang sedangkan di kuadran III (kemiskinan digital tinggi – kemiskinan ekonomi rendah), Kabupaten

Serang. Sementara Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan kota Tangerang Selatan berada di kuadran IV (kemiskinan digital rendah – kemiskinan ekonomi rendah).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan studi ini, pemerintah provinsi Banten hendaknya dapat memprioritaskan pemberian program yang dapat menurunkan indeks kemiskinan digital dan indeks kemiskinan ekonomi di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Program yang dapat diterapkan antara lain program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemberian literasi digital. Selain itu perlu diingat bahwa Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan IPM, dimana semakin tinggi nilai IP-TIK, semakin tinggi pula nilai IPM di suatu wilayah atau sebaliknya. Sehingga diharapkan penurunan angka kemiskinan digital kabupaten/ kota pada gilirannya dapat ikut menaikkan angka IPM di kabupaten/ kota di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, A., Firdousi, S. F., Waqar, A., & Awais, M. (2022). The Influence of Internet Penetration on Poverty and Income Inequality. *SAGE Open*, 12(3).
<https://doi.org/10.1177/21582440221116104>
- Badan Pusat Statistik. (2010). Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di

- Indonesia. In *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2021. In *Badan Pusat Statistik*.
- Barrantes, R. (2007). CHAPTER 2: Analysis of ICT Demand: What Is Digital Poverty and How to Measure It? *Digital Poverty*, 29–53.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=50300367&site=eds-live&scope=site>
- Budiarti, W., & Khoirunnisa. (2019). Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 759–768.
- Dhahir, D. (2019). Rancangan Strategi Kementerian Kominfo Republik Indonesia Dalam Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital Indonesian Ministry Of Communications And Informatics Strategic Plan For Reducing The Digital Divide Darman Fauzan Dhahir. *Pikom*, 20(2), 71–86.
- Flor, A. G. (2014). *ICT and Poverty : The Indisputable Link ICT AND POVERTY : THE INDISPUTABLE LINK Paper for Third Asia Development Forum on. January 2001*.
- Gracie, J. (2022). *It's all poverty: Poverty, Digital Poverty and why it matters*.
<https://digitalpovertyalliance.org/news-updates/its-all-poverty-digital-poverty-why-matters/>
- Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Pekommas*, 17(2), 81–90.
- Ibrahim, N. S. S., & Othman, N. (2022). Faktor Kemiskinan Digital dalam kalangan Pelajar Terhadap Prestasi Belajar Ketika Pandemi Covid-19. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(8), e001653.
<https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i8.1653>
- Lai, J., & Widmar, O. N. (2021). Applied Eco Perspectives Pol - 2020 - Lai - Revisiting the Digital Divide in the COVID-19 Era. In *Applied Economic Perspectives and Policy* (Vol. 43, Issue 1, pp. 458–464).
- Nasution, R. D. (2016). Effect of Digital Divide on Rural Development. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 20(1), 31–44.
<https://media.neliti.com/media/publications/123364-ID-none.pdf>
- Permatasari, D. A. (2018). *Analisis Kemiskinan Digital Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Pada Era Revolusi Industri 4.0* [Universitas Airlangga].
<http://repository.unair.ac.id/97603/>
- Sakti, P. (2022). Analisis Kemiskinan Digital Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(1).
<https://doi.org/10.25126/jtiik.202295021>
- Seah, K. M. (2020). COVID-19: Exposing digital poverty in a pandemic. In *International Journal of Surgery* (Vol. 79).
<https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.05.057>
- Susanto, A. (2016). Analisis Kondisi Digital Poverty di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 6(2), 169.
<https://doi.org/10.17933/jppi.2016.060204>